



## Planning in the Management of BUMDes Karya Unggul in Punggul Gedangan Village, Sidoarjo

### Perencanaan dalam Pengelolaan BUMDes Karya Unggul Desa Punggul Gedangan Sidoarjo

Bagio Utomo\*

PT. Konimex

#### ABSTRACT

BUMDes (Village-Owned Enterprises) are formed by the community and for the community, planning in their management already has a vision, mission, goals and work programs but there are still obstacles, namely lack of organization and lack of movement, direction in the management of BUMDes Karya Unggul Desa Punggul, if seen from the management indicators, namely planning or planning in the management of BUMDes in Punggul Village already has a vision, mission, objectives, work program, organizational structure, just how to execute the programs that have been prepared properly. If viewed from the planning indicators or planning has planned to make BUMDes according to or guided by the AD / ART that has been set by the BUMDes Punggul village, it already has a multiplicity of planning like its goals and work programs and has formed business units that will be run which It is hoped that it will be able to help the economy of the Punggul Village community and be able to increase village income. As for the AD / ART data in the form of BUMDes programs, such as savings and loan businesses, market businesses and stationery businesses. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out by means of observation, documentation, interviews with informant determination techniques, data analysis techniques using the theory of Miles and Huberman (1984).

**Keywords:** Planning, Organizing, Actuating, Controlling, BUMDes

#### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes[3]. BUMDes desa Punggul diatur oleh SK kades Punggul Nomor 17 tanggal 06 September 2018 pengelolaan BUMDes / pengurus BUMDes memiliki kewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desalainnya, melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, administrasi kegiatan dengan baik dan benar[4].

#### OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and Lely Indah Mindarti

\*Correspondence:

Bagio Utomo

bagioutomo@umsida.ac.id

Published: 29 Maret 2019

Citation:

Utomo (2019) Planning in the Management of BUMDes Karya Unggul in Punggul Gedangan Village, Sidoarjo.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 7:1.

doi: 10.21070/jkmp.v7i1.1703

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, istilah dalam bahasa Inggris lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Menurut Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu, perencanaan (*planning*), perencanaan (*planning*) diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dengan visi dan misi mencapai tujuan yang diharapkan, dimana menyangkut keterkaitan tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan dan bagaimana tata cara mencapai tujuan itu [5]. Pada perencanaan sudah terbentuknya visi, misi dan tujuan BUMDes yang akan menentukan proker kerja yang akan di jalankan, pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes masih dirasa kurang karena minimnya sosialisasi. Pada organisasi BUMDes di Desa Punggul strukturnya terlalu ramping hanya ada ketua, sekretaris, bendahara serta kurangnya SDM untuk mengisi struktur organisasi di setiap unit-unit usaha BUMDes yang sedang berjalan. Pada tahap pengarahannya BUMDes kurangnya sosialisasi ataupun pengarahannya kepada masyarakat terkait proker yang mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat. Pengawasan ini dilakukan tokoh masyarakat yang telah dipilih untuk mengawasi kegiatan pengelolaan BUMDes tetapi minimnya keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi sehingga membuat kinerja pengurus kurang maksimal dapat dilihat untuk yang menghandle semua proker hanya sekretaris dan bendahara peran ketua hanya menerima laporan dari anggotanya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul Perencanaan dalam Pengelolaan BUMDes Karya Unggul Desa Punggul Gedangan Sidoarjo [6].

## METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan BUMDes di desa Punggul dengan unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan BUMDes di desa Punggul yang diperoleh dari indikator *planning* atau perencanaan, penelitian dilakukan di BUMDes Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang tepat dengan apa yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teknik penganalisisan data menurut (Miles, B, & Huberman, 1992) yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi dan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana ukuran sebuah sample, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna umum yang ada pada lapangan [7]. Hasil yang diperoleh oleh peneliti dideskripsikan atau memaparkan wawancara mendalam terhadap objek penelitian yang ada pada lapangan sehingga penulis dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai penelitian. Adapun informan dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa Punggul, Ketua Bumdes, Sekretaris Bumdes, Bendahara Bumdes dan Masyarakat Desa Punggul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punggul terkait dengan *planning* atau perencanaan dalam pengelolaannya seperti bagaimana pelaksanaan program kerja untuk menjalankan setiap unit-unit usaha. Hasil pengamatan program-program yang aktif yaitu: unit usaha simpan pinjam, unit usaha pasar, unit usaha ATK, dalam sehari-hari kegiatan perekonomian masyarakat Desa Punggul yaitu berdagang dan kebanyakan berwirausaha seperti topi, dasi, seragam sekolah dan sepatu karena hampir setegah

masyarakat Punggul adalah berwirausaha. Dengan adanya BUMDes ini mampu lebih menekankan angka pengangguran dengan adanya program BUMDes yaitu sewa pasar agar dimanfaatkan untuk berwirausaha ada juga yang ingin membuka usaha jika tidak mempunyai modal bisa dimanfaatkan program dari BUMDes yaitu simpan pinjam.

Planning atau perencanaan yang ada pada BUMDes Karya Unggul Desa Punggul sudah sesuai dengan AD/ART yang dimana terdapat visi dan misi, tujuan, fungsi dan struktur organisasi sampai dengan bidang usaha apa saja yang harus dijalankan oleh serta darimana modal dalam usaha tersebut, jadi perencanaan BUMDes sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada desa. jika ditinjau dari indikator planning (perencanaan) dalam hal ini BUMDes sudah baik sesuai dengan AD/ART yang sudah di sepakati oleh pemerintah desa, masyarakat dan pengurus BUMDes, sudah terbentuknya visi, misi, tujuan dan struktur organisasi serta program kerja. Adapun visi dan misi, tujuan dan struktur organisasi BUMDes sebagai berikut :

a. Visi BUMDes Punggul

BUMDes Karya Unggul adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Punggul melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar, dengan moto "BERSAMA MEMBANGUN DESA".

b. Misi BUMDes Punggul

1. Terwujudnya pengembangan masyarakat melalui usaha ekonomi, usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian perdesaan.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
4. Mengelola dana program yang masuk ke desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

c. Tujuan dari BUMDes :

1. Meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

d. Program kerja BUMDes :

1. Unit usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha pasar.
3. Unit usaha ATK.

Dari ketiga usaha tersebut adapun yang berjalan hanya 2 saja dikarenakan dalam pengelolaannya kekurangan kepengurusan dan terlalu rampingnya struktur organisasi walaupun dalam perencanaan BUMDes sudah ada struktur organisasinya itu dirasa kurang karena hanya ada 3 anggota yang mengelola dan menjalankan proker tersebut.

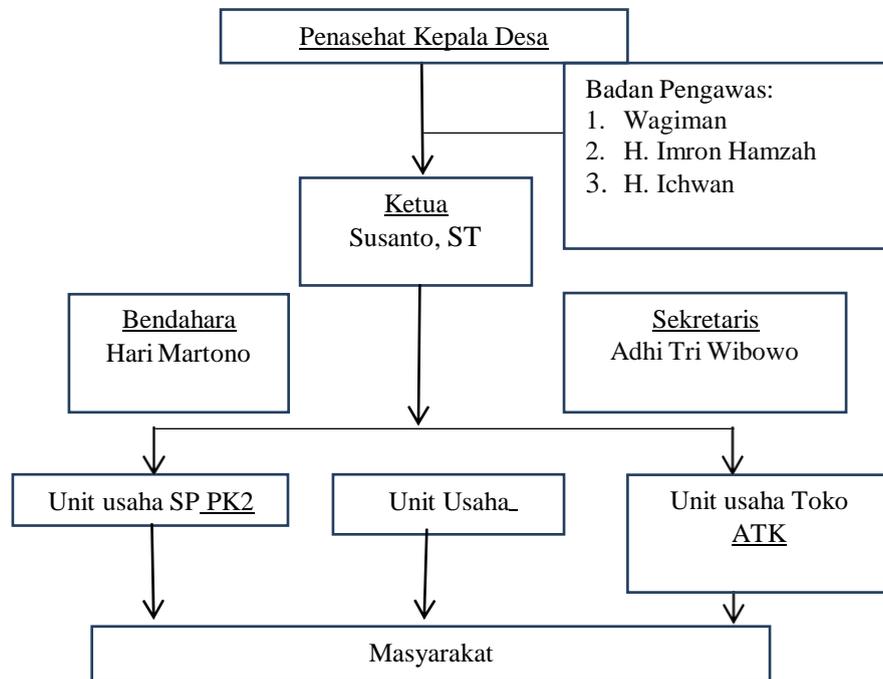
**Tabel 1**  
**Jenis Usaha Bumdes Toko Alat Tulis Kantor Desa Punggul**

<b>Toko ATK</b>	
Jenis Usaha	Perdagangan
Sasaran	Masyarakat Umum
Tingkat bunga / bulan	-
Periode Pembayaran	Tunai

**Tabel 2**  
**Jenis Usaha Bumdes Simpan Pinjam Desa Punggul**

<b>USP PK 2</b>	
Jenis Usaha	Simpan Pinjam
Sasaran	RTS Desil 2 dan 3
Tingkat bunga / bulan	1%
Periode Pinjaman	10 Bulan

Tabel 1 dan 2 menjelaskan ada dua jenis usaha di BUMDes Punggul Kecamatan Geadngan Sidoarjo yang pertama adalah USP PK2 (Usaha Simpan Pinjam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan) yang kedua ATK (Alat Tulis Kantor).



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Punggul**

Berikut ini adalah tugas pokok organisasi BUMDes Karya Unggul Desa Punggul Gedangan Sidoarjo :

#### 1. Ketua BUMDes

- a. Membahas dan menetapkan kelayakan unit usaha yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam.
- b. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.
- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- d. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Pengawas dan Penasihat serta minimal 1 Tahun sekali kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten.
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui rembug Desa Pertanggungjawaban.

#### 2. Sekretaris BUMDes

- a. Melaksanakan tugas sebagai untuk mendukung kegiatan ketua.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa.
- d. Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan.
- e. Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.

#### 3. Bendahara BUMDes

- a. Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
- c. Melakukan penagihan kepada nasabah
- d. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

Perencanaan dalam pengelolaan BUMDes Karya Unggul Desa Punggul sudah mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar diatas hanya saja pada BUMDes tersebut belum ada kepengurusan setiap unit usaha yang dijalankannya dan idealnya sebuah struktur organisasi itu lengkap terdiri dari ketua hingga anggota terbawah tetapi pada BUMDes ini terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pada BUMDes Karya Unggul terlalu ramping struktur organisasinya dan kurangnya SDM yang mampu menempati keanggotaan berakibat pada pengelolaan BUMDes dalam menjalankan setiap program kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

## KESIMPULAN

Ditinjau dari indikator planning atau perencanaan dalam pengelolaan BUMDes dari sudah memiliki visi, misi, tujuan dan program kerja. Selain itu pada organisasi sudah terdapat struktur organisasi tetapi dalam pengelolaan setiap unit usaha masih kurang adanya kepengurusan karena struktur terlalu ramping hanya ada ketua, sekretaris, bendahara yang juga mempunyai pekerjaan diluar tugas pekerjaan dari Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar dapat menambah anggota kepengurusan BUMDes Desa Punggul, mengingat terdapat tiga usaha BUMDes Desa Punggul yang memerlukan sumber daya manusia untuk mengelolanya.

## **PENDANAAN**

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

## REFERENCES

- Atas, P., Menteri, P., Negeri, D., & Tahun, N. (2007). Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. 1–13.
- Badrudin, 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Alfabeta
- Bender, D. (2016). Desa. (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manullang, 2012. Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : UGM
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Cetakan ke). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moelong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- SK kades Punggul Nomor 17 tanggal 06 September 2018
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Terry George, 2006. Asas-Asas Manajemen, Jakarta PT. Renika Cipta
- Torang, Syamsir. (2013). Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr, 249. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2019 Bagio Utomo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*